

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, *Majelis Penawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Redaksi Refika, Bandung.
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basyir, Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Ronny 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Isnaeni, Moch, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revika Petra Media, Surabaya.
- Kamelo, Tan dan Andriati, Syarifah Lisa, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan.
- Kamil, Ahmad, Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S, Djaja, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Taristo, Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung.

- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyono, 2004, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, Rianeka Cipta, Jakarta.
- Sulihandari, Hartini & Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Sy, Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

C. Karya Ilmiah :

Florida, Liana, 2012, *Tesis* Pengangkatan Anak Di Desa Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Hersany, Afika, 2014, *Tesis*, Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Islam Di Pengadilan Negeri, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Hastari Endah Rahayu, 2014, Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Tugas Notaris di Kabupaten Cilacap”, *Tesis*, Program Dtudi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Internet :

https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia/#_ftn7, diakses Tanggal 08 April 2018.

F. Wawancara

Edy Sutyana, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Klaten, 2018, Tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD), *Wawancara*, Klaten, 4 Juli.

Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten Kelas 1A , 2018, *Wawancara*, Klaten, 28 Agustus.

Nur Sakuri, 2018, Dinas Sosial Kabupaten Klaten, *Wawancara*, Klaten, 21 Agustus.

Notaris X di Kabupaten Klaten, 2018, Pengangkatan Anak, *Wawancara*, Klaten, 9 April.

Saleh Hartanto, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Klaten, 2018, *Wawancara*, Klaten, 21 Agustus.